



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. JENDERAL AHMAD YANI KAV.58 BYPASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Nomor : 1136/DJU/HK00.1/10/2019 Jakarta, 18 Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Permohonan Salinan Putusan
Pengadilan

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di -
Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 1438/SEK/KP.02.2/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019 terkait dengan surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor F26-30/V130-10/22 tanggal 27 Agustus 2019 hal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami minta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di lingkungannya masing-masing untuk melakukan inventarisasi/pendataan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap nama-nama terpidana yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di wilayah hukumnya masing-masing, untuk selanjutnya mengirimkan Salinan Putusan tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Wilayah Hukum/Administrasi untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum serta Kepala Biro Kepegawaian melalui link <https://sikep.mahkamahagung.go.id/informasi/putusan> paling lambat tanggal 31 Oktober 2019.

Demikian untuk segera dipenuhi.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

PRIM HARYADI

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Non Yudisial.
3. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1438/SEK/KP.02.2/10/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Salinan Putusan
Pengadilan

2 Oktober 2019

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Jl. Ahmad Yani No. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara nomor F26-30/V130-10/22 tanggal 27 Agustus 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, agar Ketua Pengadilan Negeri melakukan inventarisasi/pendataan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas nama terpidana yang berstatus Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di wilayah hukum Pengadilan masing-masing, untuk selanjutnya mengirimkan salinan putusan Pengadilan tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing wilayah hukum/administrasi untuk dapat digunakan sebagai dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dalam lampiran surat, dan tembusan disampaikan kepada Biro Kepegawaian melalui *link* <https://sikep.mahkamahagung.go.id/informasi/putusan> paling lambat tanggal 31 Oktober 2019.

Demikian atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,


A. S. Pudipharsoyo

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;
7. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : F26-30/V130-10/22
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Salinan Putusan Pengadilan

Jakarta, 27 Agustus 2019

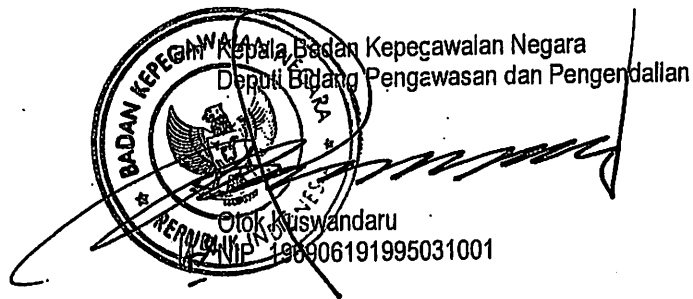
Kepada Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung ✓
di
Jakarta

Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hingga saat ini masih terdapat Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang belum memberhentikan dikarenakan belum mendapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi dasar untuk memberhentikan PNS yang bersangkutan,
2. Berdasarkan informasi bahwa para Pengelola Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota telah berupaya mencari salinan putusan pengadilan tersebut melalui laman (Website) Direktori Mahkamah Agung atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) namun kesulitan untuk menemukan salinan putusan pengadilan tersebut,
3. Selain itu para Pengelola Kepegawaian di Provinsi/Kabupaten/Kota juga telah berupaya berkoordinasi dan bersurat ke Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing untuk memperoleh salinan putusan pengadilan, namun demikian masih belum mendapatkan salinan putusan tersebut,
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (8) KUHP ditentukan bahwa putusan pengadilan hanya diberikan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, namun demikian sesuai dengan hasil rapat tanggal 29 Januari 2019 di Hotel Royal Kuningan yang antara lain dihadiri oleh Bapak Sekretaris Mahkamah Agung, bahwa bagi instansi pemerintah pusat/daerah yang membutuhkan salinan putusan pengadilan maka dapat bersurat kepada Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung,
5. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mempercepat pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, mohon bantuan Bapak Sekretaris Mahkamah Agung untuk memfasilitasi dengan memberikan salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dapat digunakan sebagai dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dalam daftar lampiran, dan tembusannya disampaikan kepada kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

The image shows an official circular stamp of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) with a Garuda emblem in the center. The text around the stamp reads "BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA" and "REPUBLIC OF INDONESIA". To the right of the stamp, the text reads "Kepala Badan Kepegawaian Negara" and "Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian". Below this, there is a handwritten signature and the name "Otok Kuswanda" followed by the NIP number "196906191995031001".

Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Otok Kuswanda
NIP. 196906191995031001

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
4. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lampiran Surat

No : #26-30/A/BO-10/22

Tanggal : 27 Agustus 2019

DAFTAR PNS YANG BELUM MENDAPATKAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN

NO	NAMA	LOKASI
1	Arifin Nasution, SP.,	Provinsi Sumatera Utara
2	Lilis Setyorini, SE	Pemerintah Kab. Nganjuk
3	M. Mauluddin, S.IP., M.Si	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
4	Asniwati	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
5	Herman, S.Sos	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
6	Sutarman	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
7	Nawawi	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
8	Drs, Alamsyah	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
9	Drs. H. Rusman, MM	Pemerintah Kota Pare-Pare
10	Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM	Pemerintah Kota Pare-Pare
11	Drs. Ec. Anwar., M.Si	Pemerintah Kota Pare-Pare
12	H. Badaruddin, SE., Ak	Pemerintah Kota Pare-Pare
13	Budiman	Pemerintah Kota Pare-Pare
14	Ir. H Abdul Latif, M.Si	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
15	Lindawati Br Ginting	Pemerintah Kab. Karo
16	Riadi Tarigan	Pemerintah Kab. Karo
17	Nomi Sinuhaji	Pemerintah Kab. Karo
18	Hendra Ginting	Pemerintah Kab. Karo
19	Ebeneser Suranta Sitepu	Pemerintah Kab. Karo
20	Herlina Rahmah Batubara	Pemerintah Kab. Karo
21	Evliawati Br Br Barus	Pemerintah Kab. Karo
22	Warita Siagian	Pemerintah Kab. Karo
23	Dr. Suara Ginting	Pemerintah Kab. Karo
24	Sudinarta Barus	Pemerintah Kab. Karo
25	Flordia br Barus	Pemerintah Kab. Karo
26	Kampung Sitepu	Pemerintah Kab. Karo
27	Nikson tarigan	Pemerintah Kab. Karo
28	Ariaty Br Sembiring	Pemerintah Kab. Karo
29	Drs. Abdy Muham	Pemerintah Kab. Karo
30	Sandari	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara

31	Khairil Azhar	Pemerintah Kab. Biruen
32	Mukhtar	Pemerintah Kab. Biruen
33	Hamidah	Pemerintah Kab. Batubara
34	Humaldi	Pemerintah Kab. Batubara
35	Mona Sianturi	Pemerintah Kab. Toba Samosir
36	Indra Fauzi	Pemerintah Kota Medan
37	Machendra	Pemerintah Kab. Lampung Utara
38	Ade Kuswanda Saputra	Pemerintah Kab. Bintan
39	Mohammad Yanuar	Pemerintah Provinsi Riau
40	Arifuddin	Pemerintah Kab. Sumbawa
41	H. Mauluddin Bin M. Darwis	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
42	Abdul Kadir, SH	Pemerintah Kab. Lombok Utara
43	Rambeli, SE	Pemerintah Kabupaten Kotabaru
44	Joko Iswidodo, SP	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
45	Sofyan	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu
46	Souver Firdaus, ST, MM	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu
47	Drs Asli Yakin, M.Si	Pemerintah Kabupaten Tabalong
48	Alfian, S.STP	Pemerintah Kabupaten Tabalong

129